

ANALISIS VARIASI HARGA BERAS DI TINGKAT PETANI DENGAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BERAS (KASUS: DESA MELATI II, KECAMATAN PERBAUNGAN, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

David Michael Siahaan*), Luhut Sihombing), Tavi Supriana**)**

- *) Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Jl. Prof. A. Sofyan No. 3 Medan.
Hp. 085270900961, E-mail : davmicha96@icloud.com
- ***) Staf pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi penetapan harga eceran tertinggi beras, menganalisis besar perbedaan harga beras di tingkat petani dengan harga eceran tertinggi dan menganalisis dampak penetapan harga eceran tertinggi terhadap harga gabah di tingkat petani di Desa Melati II. Metode penentuan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive area sampling*. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 60 sampel petani. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, metode *one sample t test* dan metode *paired sample t test*. Hasil penelitian menunjukkan implementasi harga eceran tertinggi beras berjalan kurang baik. Harga beras di tingkat petani adalah Rp. 6.087/Kg lebih kecil dari harga yang ditetapkan pemerintah (HPP) yaitu Rp. 7.300/Kg. Penetapan harga eceran tertinggi mengakibatkan harga gabah turun menjadi rata-rata Rp.3.757/Kg.

Kata Kunci : harga beras, harga eceran tertinggi beras, harga gabah.

ABSTRACT

The purpose of this research is analyze the implementation of the highest retail rice determination, to analyze the differences of rice price at the farmer level with the highest retail price and to analyze the impact of the highest retail price determination on the price of grain at the farmer level in Melati II Village. Method of determining area used in this research is purposive sampling method. Sampling was done by random sampling method with total sample of 60 samples of farmers. The analysis method used is descriptive method, one sample t test method and paired sample t test method. The results showed that the implementation of the highest retail price of rice went poorly. The price of rice at the farm level is Rp. 6.087 / Kg is less than the government set price (HPP) of Rp. 7,300 / Kg. Determination of the highest retail price resulted in the price of grain fell to an average of Rp.3.757 / Kg.

Keywords: price of rice, highest retail price of rice, price of grain.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persoalan beras di Indonesia juga merupakan isu sentral yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional. Ketersediaan dan pemerataan distribusi beras serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat merupakan persoalan yang nampaknya belum bisa diatasi sampai sekarang. Beras sendiri memiliki nilai strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan bahkan masa sekarang ini, menunjukkan harga pangan yang melonjak tinggi dapat menimbulkan goncangan di masyarakat, sehingga isu mengenai persoalan beras ini selalu menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat (Surono, 2001).

Fakta di lapangan harga jual beras melambung tinggi di pasar-pasar tradisional Sumatera Utara sekitar Rp. 11.000/kg – Rp. 12.000/kg beras kualitas medium pada kuartal pertama di tahun 2017. Hal ini dikarenakan pengumpul beras mengambil margin keuntungan terlalu besar. Pengumpul beras cenderung melakukan praktik kecurangan melakukan kartel harga dan konsumen merasa disulitkan untuk harga beras yang tidak stabil. Oleh karena itu pemerintah melalui kebijakannya memberlakukan harga eceran tertinggi untuk komoditas beras.

Harga eceran tertinggi merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap suatu harga barang yang telah ditetapkan dalam suatu kontrak dalam suatu masa perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang ada. Harga pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga di atas harga maksimum yang telah ditetapkan (Nuraini, 2001).

Pada akhir Agustus 2017, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium dan premium sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 yang berlaku efektif pada 1 September 2017. Penetapan HET tersebut ditujukan dalam rangka menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, keterjangkauan harga beras di konsumen serta mencegah terjadinya spekulasi harga. Diluar dari tujuan tersebut, penetapan HET beras sampai saat ini masih menuai kontroversi. Salah satunya dampak negatif yang ditimbulkan dari

penetapan HET berpotensi merugikan berbagai pihak, khususnya petani (Buletin APBN, 2017).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu diteliti:

- 1) Bagaimana implementasi penetapan Harga Eceran Tertinggi beras di daerah penelitian?
- 2) Berapa perbedaan harga beras di tingkat petani dengan Harga Eceran Tertinggi di daerah penelitian?
- 3) Bagaimana dampak penetapan Harga Eceran Tertinggi terhadap harga gabah ditingkat petani di daerah penelitian?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis implementasi penetapan Harga Eceran Tertinggi beras di daerah penelitian.
- 2) Untuk menganalisis perbedaan harga beras di tingkat petani dengan Harga Eceran Tertinggi di daerah penelitian.
- 3) Untuk menganalisis dampak penetapan Harga Eceran Tertinggi terhadap harga gabah ditingkat petani di daerah penelitian.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi para petani agar dapat mengetahui informasi tentang harga beras.
- 2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam hal Harga Eceran Tertinggi beras.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

Beras menempati urutan pertama dalam jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia, walaupun konsumsinya semakin menurun. Penurunan konsumsi ini dapat diakibatkan oleh peningkatan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan. Selain itu pendapatan yang meningkat tidak menyebabkan peningkatan konsumsi karbohidrat, tetapi beralih ke pemenuhan protein, seperti daging, ayam, susu, telur, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan proporsi pengeluaran untuk beras dalam total pengeluaran untuk makanan di tingkat perkotaan maupun nasional secara seragam dipengaruhi oleh harga beras dan pendapatan konsumen.

Posisi Strategis Beras

Sebagai komoditi strategis, peranan beras sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk, sektor perberasan juga memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat di berbagai bidang ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, pembangunan pedesaan dan juga politik. Masalah perberasan selalu menjadi perhatian dari berbagai komponen masyarakat dan persoalan beras sering merupakan isu hangat dan menjadi agenda penting bagi pemerintahan.

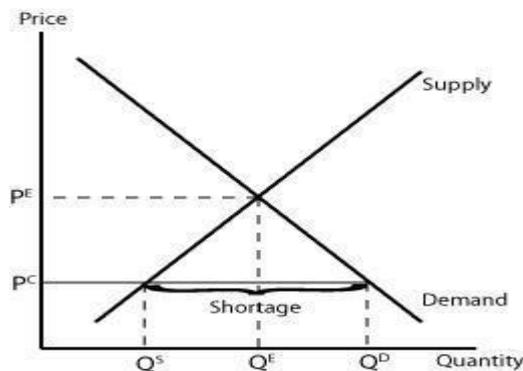
Posisi beras sebagai bahan makanan pokok menyebabkan komoditas ini menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat. Naik turunnya harga beras langsung berpengaruh terhadap inflasi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Pemerintah melalui kebijakannya dapat mengatur harga beras agar tetap stabil. Campur tangan pemerintah terlihat nyata pada kebijakan mengenai harga dasar pembelian gabah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang tinggi dikarenakan penawaran yang sedikit pada musim paceklik dan melindungi produsen dari harga gabah yang rendah saat musim panen (Sukirno, 2005).

Landasan Teori

Harga Eceran Tertinggi (*Ceiling Price*)

Harga eceran tertinggi adalah harga maksimal yang ditetapkan oleh Pemerintah pada komoditi dan jasa tertentu yang diyakini telah dijual pada tingkat harga yang lebih tinggi dari wajar yang merugikan konsumen. Namun akan ada konsekuensi jika *Ceiling Price* ditetapkan pada tingkat harga di bawah harga keseimbangan pasar.



Gambar 2.1 Keadaan Ekulibrium Dalam Kebijakan *Ceiling Price*

Ketika *Ceiling Price* ditetapkan pada tingkat harga di bawah harga pasar, maka akan terdapat kelebihan permintaan (*excess demand*) atau kekurangan *supply*. Jumlah produksi akan lebih sedikit ketika harga rendah, sedangkan permintaan akan semakin banyak karena harga yang lebih murah. Permintaan akan lebih besar dari pada *supply* dimana akan lebih banyak orang yang ingin membeli pada harga yang lebih murah namun *supply* terbatas.

Jika kurva permintaan elastis maka total dampak kepada surplus konsumen akan positif. Di sisi produsen, surplusnya akan mengalami penurunan dimana akan ada produsen yang keluar dari pasar karena tidak bisa memproduksi pada tingkat harga yang ditentukan dan produsen yang tinggal di pasar harus menerima tingkat harga yang rendah.

Ceiling Price ditujukan untuk melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak terduga. Kebijakan *Ceiling Price* akan efektif jika diiringi dengan kebijakan operasional pendukung seperti Operasi Pasar pada waktu tertentu dimana pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar.

Penerapan *Ceiling Price* di bawah harga keseimbangan (*equilibrium price*) pasar pada kurva permintaan dan *supply* yang elastis akan berdampak sebagai berikut (Besanko dan Braeutigam, 2011):

- a. Terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*).
- b. Produksi yang di *supply* di pasar lebih rendah relatif terhadap tingkat yang efisien yaitu jumlah yang di *supply* saat tidak ada intervensi Pemerintah.
- c. Surplus produsen lebih rendah dibandingkan sebelum penerapan *Ceiling Price*
- d. Sebagian dari surplus produsen yang hilang ditransfer ke konsumen.
- e. Karena adanya *excess demand*, besar surplus konsumen tergantung pada aksesibilitas konsumen terhadap produk. Oleh karena itu surplus konsumen dapat meningkat atau bahkan turun jika barang tidak tersedia karena penerapan *Ceiling Price*.
- f. Akan terjadi *deadweight loss* yaitu berkurangnya surplus total (surplus konsumen dan surplus produsen) yang terjadi karena pasar tidak beroperasi secara optimal. Dalam hal ini karena output yang tersedia terbatas.

METODE PENELITIAN

Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Daerah penelitian ini ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan tertentu. Desa Melati II merupakan salah satu sentra produksi tertinggi kedua komoditi padi sawah di Kecamatan Perbaungan dengan luas lahan sawah tanaman padi 1.180 Ha. Kecamatan Perbaungan juga dipilih atas dasar pertimbangan karena Kecamatan Perbaungan merupakan penghasil padi tertinggi di Kabupaten Serdang Bedagai dengan total produksi sebesar 76.084 Kg dan luas panen 13.705 Ha.

Metode Penentuan Sampel

Populasi penelitian adalah petani padi sawah di Desa Melati II. Pengambilan sampel 60 petani dari 3126 populasi dilakukan dengan menggunakan *Simple Random Sampling* dan besar sampel dengan menggunakan metode roscocoe.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian wawancara

langsung dengan responden di Desa Melati II dan data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga terkait.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan untuk setiap tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Metode yang digunakan untuk tujuan penelitian pertama yaitu menganalisis implementasi harga eceran tertinggi (HET) beras di Desa Melati II adalah dengan metode deskriptif.

Metode yang digunakan untuk tujuan penelitian kedua yaitu untuk menganalisis perbedaan harga beras di tingkat petani dengan HET di daerah penelitian di analisis dengan menggunakan uji *one sample t test*. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai t hitung didapat dari tabel t yang nilainya disesuaikan dengan nilai dari derajat kepercayaan (α) dan *degree of freedom* (dF). Sedangkan nilai dari t hitung dalam Riadi (2015) dapat diperoleh dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\bar{x}}{\frac{s}{\sqrt{N}}}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung

\bar{x} = rata-rata harga gabah di tingkat petani

s = standar deviasi

N = jumlah petani

Kriteria pengambilan keputusan :

t-hit > t-tab maka H0 ditolak yang artinya ada perbedaan yang nyata antara harga beras di tingkat petani dengan harga eceran tertinggi.

t-hit < t-tab maka H0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara harga beras di tingkat petani dengan harga eceran tertinggi.

Metode yang digunakan untuk tujuan penelitian ketempat yaitu untuk menganalisis dampak penetapan HET terhadap harga gabah di tingkat petani di daerah penelitian di analisis dengan menggunakan uji *paired sample t test*. Analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang

mendapatkan suatu perlakuan yang kemudian akan dibandingkan rata-rata dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam perhitungan manual *Paired-sample t test* dalam Riadi (2015) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung

\bar{x}_1 = rata-rata harga gabah sebelum harga eceran tertinggi

\bar{x}_2 = rata-rata harga gabah sesudah harga eceran tertinggi

s_1 = standar deviasi harga gabah sebelum harga eceran tertinggi

s_2 = standar deviasi harga gabah sesudah harga eceran tertinggi

n_1 = jumlah petani sampel sebelum harga eceran tertinggi

n_2 = jumlah petani sampel sesudah harga eceran tertinggi

Kriteria uji :

$t_{\text{hit}} > t_{\text{tab}}$ maka H_0 ditolak yang artinya ada pengaruh perbedaan harga gabah petani sebelum dan sesudah penetapan harga eceran tertinggi.

$t_{\text{hit}} < t_{\text{tab}}$ maka H_0 diterima yang artinya tidak ada pengaruh perbedaan harga gabah petani sebelum dan sesudah penetapan harga eceran tertinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Harga Eceran Tertinggi Beras

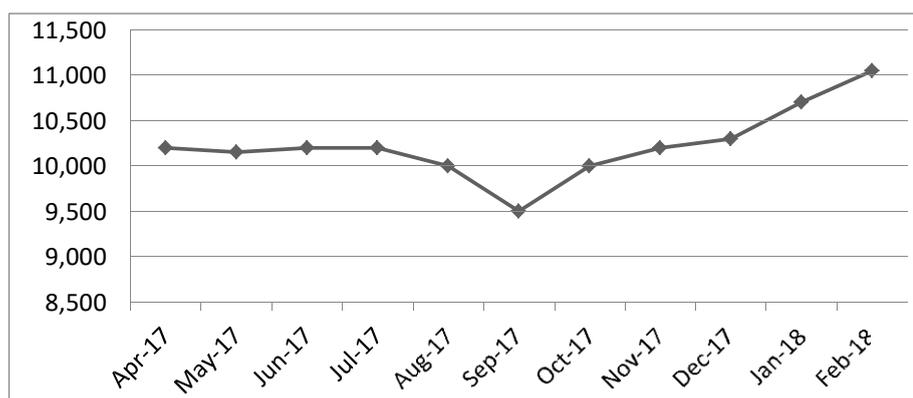
Kebijakan harga beras merupakan salah satu instrumen penting Pemerintah sejak lama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Bentuk kebijakan ini disesuaikan dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan ekonomi beras nasional, kondisi lingkungan strategis ekonomi global, dan alat analisis yang tersedia dan dikuasai pada masanya. Selain itu, prioritas pembangunan nasional yang berubah setiap era pemerintahan juga sangat menentukan format kebijakan harga ini.

Tabel 1 Perbandingan Harga Beras di Tingkat Desa dengan HET

Periode	Harga Beras di Desa (Rp/Kg)	HET Beras Medium (Rp/Kg)	Keterangan
Sep 017	9550	9.950	Di bawah HET
Okt 017	10.100	9.950	Di atas HET
Nov 017	10.200	9.950	Di atas HET
Des 017	10.300	9.950	Di atas HET
Jan 018	10.700	9.950	Di atas HET
Feb 018	10.850	9.950	Di atas HET

Sumber: Kantor Kepala Desa Melati II, 2018

Berdasarkan Tabel 1 harga beras turun di bawah HET pada saat penetapan harga eceran tertinggi beras pada bulan September 2017. Hal ini karena pada bulan September di desa melati II sedang berlangsung panen padi. Harga gabah jual petani menjadi rendah karena bersamaan dengan ditetapkannya HET. Harga gabah yang rendah berdampak pada harga beras juga yang ikut turun di desa ini.



Pada saat penjualan gabah oleh petani kepada tengkulak maupun langsung ke penggilingan padi diawasi oleh Kamtibmas setempat untuk menghindari kecurangan seperti pembelian gabah yang tinggi atau di atas Harga Pembelian Pemerintah. Karena jika pembelian gabah dengan harga yang tinggi maka otomatis harga beras juga akan tinggi.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena harga kembali naik pada bulan berikutnya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Penggilingan padi menimbun beras yang ada untuk sementara, kemudian dijual kembali lagi pada saat harga beras sudah naik seperti sebelumnya. Secara umum hasil analisis di Desa Melati II dalam kurun waktu September 2017 sampai Februari 2018 menunjukkan bahwa implementasi HET beras berjalan kurang baik.

Analisis Perbedaan Harga Beras di Tingkat Petani dengan HET Beras

Uji yang dilakukan dalam menganalisis data/variable perbedaan harga beras di tingkat petani setelah penetapan HET beras tahun 2017 dengan menggunakan program SPSS 20. Dalam hal ini uji beda rata-rata yang dilakukan adalah dengan metode *One Sample T Test*. Uji ini dilakukan karena data harga yang digunakan adalah bersifat kuantitatif dan berdistribusi normal yang dibandingkan dengan penetapan HET oleh Pemerintah (bersifat konstanta).

Dari hasil analisis uji beda rata-rata yang dilakukan antara HET beras yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan yang telah dikeluarkan dengan harga beras di tingkat petani di Desa Melati II terlihat bahwa nilai signifikan $0,000 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan yang nyata antara harga beras di tingkat petani dengan HET beras yang ditetapkan pemerintah. Rata-rata harga beras di tingkat petani lebih kecil dari Harga Eceran Tertinggi beras yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendag yang dikeluarkan untuk wilayah Sumatera Utara. Hasil uji beda tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Uji Beda Rata-rata Satu Sampel

No	Peraturan Menteri Perdagangan	HET Beras (Rp/Kg)	Harga rata-rata beras tingkat petani (Rp/Kg)	Uji beda satu sampel		
				N	t-hitung	Sig
1	Nomor 57 thn 2017	9.950	6.087	60	429.47	0,000

* Harga beras didapat dari harga gabah kering panen (GKP) dibagi rendemen (62 %).

* 1 Kg beras sama dengan 1,62 Kg gabah kering panen (GKP) didapat dari rendemen (62 %).

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel $429,47 > 1,671$ yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima bahwa ada perbedaan yang nyata antara harga beras di tingkat petani dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Perbedaan harga beras di tingkat petani dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah terlihat cukup besar. Hal ini tidak sesuai dengan

ketentuan Inpres No. 5 tahun 2015 yang mengatur Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras sebesar Rp. 7.300/kg di tingkat petani.

Harga beras di tingkat petani Rp. 6.087/kg sudah jauh dibawah HPP yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tentu saja sangat merugikan petani ditambah lagi ongkos produksi yang meningkat setiap musimnya. Penetapan kebijakan harga eceran tertinggi ini menimbulkan permasalahan bagi petani di daerah penelitian. Petani menilai harga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut terlalu rendah. Perlu adanya kajian ulang mengenai harga tersebut agar tidak merugikan petani.

Permasalahan berikutnya yang ditimbulkan dari kebijakan HET beras adalah kecenderungan penimbunan beras oleh distributor. Distributor tidak ingin menjual beras dengan harga yang rendah. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah membuat hal ini terjadi.

Analisis Dampak Harga Eceran Tertinggi Beras terhadap Harga Gabah di tingkat Petani

Uji yang dilakukan dalam menganalisis data/variabel bagaimana pengaruh harga gabah di tingkat petani sebelum dan sesudah penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras dengan menggunakan program SPSS 20. Dalam hal ini uji beda rata-rata yang dilakukan adalah dengan metode *Paired Sample T Test*. Analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapatkan suatu perlakuan yang kemudian akan dibandingkan rata-rata dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah perlakuan.

Tabel 3 Hasil uji beda rata-rata harga gabah sebelum dan sesudah HET

No	Jumlah Sampel Petani	Harga rata-rata gabah		Df	Uji beda	
		Sebelum HET	Sesudah HET		t-hitung	Sig
1	60	4750	3757	59	18.39	0,000

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil uji beda rata-rata harga gabah sebelum dan sesudah penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras di peroleh t hitung $18,39 > 1,67$ dengan df 59 dan sig $0,00 < 0,05$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada dampak penetapan harga eceran tertinggi beras terhadap harga gabah di tingkat petani. Harga rata-rata gabah dari 60

sampel petani sebelum penetapan harga eceran tertinggi beras adalah Rp.4.750/Kg gabah dan sesudah penetapan harga eceran tertinggi adalah Rp.3.757/Kg. Ada dampak penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengakibatkan harga gabah petani menjadi menurun.

Dampak penetapan harga eceran tertinggi merugikan petani dari segi penerimaan harga gabah yang diperolehnya, tetapi menguntungkan petani juga sebagai konsumen beras. Permasalahan yang terjadi adalah harga beras yang turun pasca penetapan harga eceran tertinggi tidak berlangsung lama harga beras kembali naik, hal ini mengakibatkan kerugian juga bagi petani sebagai konsumen beras. Kenaikan harga beras kembali terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah dan kurangnya produksi beras secara nasional, oleh karena itu sebelum kebijakan harga eceran tertinggi beras ditetapkan perlu pengkajian dari hulu ke hilir, agar kebijakan ini menguntungkan setiap pelaku ekonomi bukan malah merugikan pihak-pihak tertentu, terutama petani padi.

Penerimaan Petani

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras juga berdampak pada penerimaan petani di desa melati II. Penurunan harga gabah berdampak pada menurunnya penerimaan petani. Untuk melihat sejauh mana dampaknya dapat dilihat di Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Beda Rata-rata Penerimaan Petani

No	Jumlah	Rata-rata Penerimaan (Rp)		Uji beda	
Sampel Petani		Sebelum HET	Sesudah HET	t-hitung	Sig
1	60	19.802.104	16.747.291	3,179	0,002

Dari Tabel 4 dapat dilihat dari hasil uji beda rata-rata atau perbandingan penerimaan petani sebelum dan sesudah penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras oleh pemerintah. Nilai t-hitung $3,179 > 1,67$ dengan df 59 lebih besar dari nilai t-tabel dan nilai Sig $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada dampak penetapan harga eceran tertinggi beras terhadap penerimaan petani. Sebelum penetapan harga eceran tertinggi rata-rata penerimaan petani adalah Rp. 19.802.104 dan setelah penetapan harga eceran tertinggi beras oleh

pemerintah menjadi Rp. 16.747.291. Ada selisih rata-rata penerimaan sebelum dan sesudah penetapan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 3.054.813.

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dapat menjadi pemicu terjadinya transmisi harga vertikal yang tidak simetris. Contoh kebijakan harga eceran tertinggi, dimana Pemerintah melakukan intervensi harga pada saat mekanisme pasar menyebabkan harga produk menjadi sangat rendah dan merugikan petani. Pada saat terjadi penurunan harga di level petani, pedagang akan percaya bahwa penurunan tersebut hanya bersifat sementara karena Pemerintah akan segera melakukan intervensi. Sehingga pedagang tidak akan dengan cepat melakukan penyesuaian harga jual saat terjadi penurunan harga di level petani. Sebaliknya, pada saat terjadi kenaikan harga di level petani, pedagang akan menganggap bahwa perubahan tersebut sifatnya permanen sehingga akan dengan segera melakukan penyesuaian harga jualnya. Pada kasus perdagangan beras di Indonesia, pada dasarnya Pemerintah telah menerapkan kebijakan harga dasar sejak masa Orde Baru. Hanya saja, pada periode tersebut kebijakan harga dasar gabah disertai dengan kebijakan harga eceran tertinggi di level konsumen. Akibatnya, disparitas harga yang terjadi relatif kecil dan proses transmisi harga terjadi secara simetris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah :

1. Implementasi harga eceran tertinggi di Desa Melati II berjalan kurang baik.
2. Harga beras di tingkat petani lebih kecil dari harga eceran tertinggi (HET) beras. Harga beras ditingkat petani turun menjadi rata-rata Rp. 6.087/kg. Harga ini tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Inpres No. 5 tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 7.300/Kg.
3. Dampak penetapan harga eceran tertinggi beras mengakibatkan turunnya harga gabah petani dari rata-rata harga gabah sebelum HET adalah sebesar Rp. 4.750/Kg menjadi Rp. 3.757/Kg. Penerimaan rata-rata petani sebelum penetapan HET beras Rp. 19.802.104 dan sesudah penetapan HET beras menjadi Rp.16.747.291.

Saran

Kepada Petani Padi

Sebaiknya para petani tetap memperkuat organisasi kelompok tani yang ada di Desa Melati II sehingga dapat membantu satu sama lain dalam memperoleh informasi harga maupun dalam memecahkan masalah harga gabah dan tetap menjaga kualitas padi agar dapat berdaya saing dalam pasar yang lebih luas cakupannya.

Kepada Pemerintah

- a. Sebaiknya pemerintah sebelum menetapkan kebijakan melakukan sosialisasi terlebih agar petani mengerti kebijakan yang ditetapkan.
- b. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang terlebih dahulu kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebelum menetapkan harga eceran tertinggi beras yang di anggap petani masih terlalu rendah.

Kepada Peneliti Lain

Diharapkan kepada peneliti lain untuk melanjutkan penelitian mengenai dampak penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Besanko, D dan Ronald, R. (2011). *Macroeconomics. 4th Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Nuraini. 2001. *Pengantar Ekonomi Mikro*. UMM, Malang
- Sukirno, S. 2008. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surono, S. 2001. *Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Impor Beras Serta Kebijakan Pemerintah Untuk Melindungi Petani*, dalam Suryana, Achmad dan Sudi Mardianto (penyunting), Bunga Rampai Ekonomi Beras. LPEM-UI, Jakarta.